

ABSTRAK

Putri Rizki Cantika Dewi, 1208010152, 2024. Evaluasi Pelayanan Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Tanjungsari Kementrian Agama Kabupaten Sumedang

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan pelayanan publik, termasuk melalui lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Di KUA Kecamatan Tanjungsari, terdapat permasalahan pernikahan dini yang melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah. Pernikahan dini, khususnya di kalangan anak perempuan di bawah umur, merupakan isu penting yang melibatkan pelanggaran hak anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani kasus pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini, serta menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaannya. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini yang masih marak terjadi di masyarakat.

Metode penelitian kualitatif dipilih untuk memperoleh wawasan yang mendalam mengenai fenomena pernikahan dini ini. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih detail dan komprehensif terkait pengalaman, persepsi, dan pandangan para pihak yang terlibat. Sebagai landasan teoretis, teori evaluasi dari William N. Dunn digunakan untuk menganalisis efektivitas program yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani kasus-kasus pernikahan dini. Dengan menggunakan teori ini, penelitian diharapkan dapat memberikan evaluasi yang objektif dan menyeluruh tentang sejauh mana program-program yang ada telah berhasil mencapai tujuannya dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan KUA dalam menangani pernikahan dini belum optimal, terutama karena kendala dalam sumber daya manusia, termasuk kurangnya tenaga ahli, jumlah petugas penyuluhan yang terbatas, dan minimnya pelatihan untuk staf. Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, disarankan untuk memperkuat SDM dengan merekrut tenaga ahli tambahan, menyediakan pelatihan yang komprehensif, dan mengelola sumber daya dengan lebih baik.

Kata Kunci : Evaluasi, Pelayanan, Pernikahan Dini.